**IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KOTA
MATARAM
(STUDI KASUS PADA BPKAD KOTA MATARAM)**

Oleh:

Rachmat Hidayat (NIM: 125020307111030)

Dosen Pembimbing:

Mirna Amiry, MSA., Ak., AAP –B., AAP -A. (NIP. 198412202014042002)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi akuntansi basis akrual di Pemerintah Kota Mataram khususnya BPKAD Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci di BPKAD Kota Mataram.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, BPKAD sudah melakukan persiapan menyambut basis akrual salah satunya dengan cara menyisihkan piutang dengan menggunakan persentase tersendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penyisihan Piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi basis akrual di BPKAD Kota Mataram berjalan baik. Hal ini didukung oleh; (1) komitmen pimpinan yang tinggi; (2) sumber daya manusia (SDM) yang kompeten; (3) teknologi informasi yang memadai; (4) regulasi yang mengakomodir basis akrual; dan (5) kerjasama serta dukungan semua pihak.

Kata Kunci: **Implementasi Basis Akrual, BPKAD Kota Mataram**

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of accrual accounting in the government of Mataram city especially in BPKAD Kota Mataram. The method used in this study is a qualitative approach using a case study method. Data are collected using observation, documentation and in-depth interviews with key informants in BPKAD Mataram city.

Since the issuance of Government Regulation Nomor. 71 Tahun 2010 about Accrual Based Government Accounting Standards, BPKAD already made preparations to adopt accrual system by setting allowances of doubtful receivables by issuing mayor regulation about allowances of doubtful receivables. The results show that in general the implementation of the accrual basis in BPKAD Kota Mataram went well. This is supported by; (1) high management commitment; (2) competent human resources; (3) adequate information technology; (4) the regulation to accommodate the accrual based; and (5) the cooperation and support of all parties.

Keyword: **accrual based accounting system, BPKAD Kota Mataram**

PENDAHULUAN

Perjalanan panjang penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sosial politik yang mempengaruhi perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntansinya, karena penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan (Sari, 2010).

Halim (2009) menyatakan bahwa setelah lima tahun mengupayakan berbagai usaha reformasi di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, pada tahun 2003 dihasilkan satu paket perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini menjadi dasar pengelolaan keuangan negara yang

mengacu pada *International Best Practices*.

Reformasi pengelolaan keuangan negara menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus berbenah dan melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman inti bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan

Inti dari ketentuan Undang-Undang di atas bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun, yaitu paling lambat tahun 2008. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan penggunaan basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*), yaitu laporan realisasi anggaran disusun menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca menggunakan basis akrual (Halim dan Kusufi, 2014).

Pada praktiknya, akuntansi berbasis akrual tidak mudah diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia karena pemerintah telah mempraktikkan akuntansi berbasis kas selama bertahun-tahun. Penerapan basis akrual mensyaratkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang memberikan kerumitan tersendiri bagi instansi sehingga implementasinya tidak dapat segera diadopsi dan membutuhkan waktu yang

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

tidak sebentar (Halim dan Kusufi, 2014). Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak melaksanakan basis akrual. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat maupun daerah tentu saja memberikan dampak yang lebih baik tetapi juga menimbulkan pro dan kontra dalam melaksanakan perubahan tersebut.

Saat ini kendala yang dihadapi pemerintah Kota Mataram dalam implementasi akuntansi basis akrual adalah SDM yang berkompeten dibidang akuntansi baik kualitas maupun kuantitas seperti yang sudah dijelaskan oleh Yance Hendradirra selaku Kepala BPKAD Kota Mataram. Selain itu sarana dan prasarana, komitmen dari pimpinan serta ketersediaan anggaran juga salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi akuntansi basis akrual. Ardianysah (2013)

menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan implementasi akrual di pemerintah Kota Mataram memerlukan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu BPKAD selaku *leading sector* dalam pengelolaan keuangan di Kota Mataram memiliki pekerjaan rumah untuk mengimplementasikan basis akrual dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat SKPD-SKPD yang ada di Kota Mataram masih kesulitan dalam menerapkan basis akrual.

Sebagai *role model* dalam pelaksanaan basis akrual di Kota Mataram maka BPKAD harus membuktikan bahwa aturan baru tersebut bukan menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Basis Akrual

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Sedangkan, jika ada basis akuntansi yang lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi di antara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi. Basis akrual

Kota Mataram kedepannya dan harapan untuk meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bisa diwujudkan kembali. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pelatihan selama tujuh hari kepada dua staf dari BPKAD (<http://www.mandalikanews.com>).

Diharapkan staff yang sudah mengikuti pelatihan tersebut dapat menularkan ilmu kepada seluruh staff yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya. Jika diibaratkan sebuah rumah, BPKAD sebagai pondasi harus dikuatkan terlebih dahulu agar kuat menopang beban di atasnya begitupun halnya dengan basis akrual maka di BPKAD harus dikuatkan dulu pemahaman mengenai akrual basis sehingga dapat berjalan dengan baik.

adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Ritonga (2010) akuntansi berbasis akrual berarti bahwa pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. Simanjuntak (2010) menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam pelaporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas dibayarkan. Menurut Mahmudi (2011) dalam pengaplikasiannya akuntansi berbasis akrual memiliki tujuan dalam penentuan biaya pelayanan (*cost of service*) dan penentuan harga/tarif pelayanan

Kelebihan Akuntansi Basis Akrual

Akuntansi berbasis akrual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) No.1 tentang *Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second edition, 2003)* penerapan basis akrual memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari akuntansi basis akrual:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
2. Menyediakan informasi yang digunakan oleh pengguna laporan

(*pricing/charging for service*). PSAP 01 juga menyatakan bahwa basis akrual yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Harun (2009:43) juga menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah sebuah metode umum dalam sistem pencatatan akuntansi *double entry* yang mempertemukan pendapatan dan biaya pada periode yang saling berkaitan.

keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi segala kewajiban serta komitmen yang ada.

3. Menunjukkan posisi dan perubahan posisi keuangan pemerintah.
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir dalam penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua

Pada penyusunan dan penerapannya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memang cukup memberi dilema tersendiri bahkan banyak tekanan dan tantangan yang terjadi. Namun demikian, akuntansi berbasis akrual di suatu organisasi pemerintahan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh, yakni (Ichsan, tanpa tahun):

1. Sebagai bentuk pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*).
2. Sebagai suatu peluang untuk menerapkan prinsip *cost against revenue*.
3. Sebagai suatu fondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau pelayanan yang lebih baik.
4. Sebagai suatu sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap produk dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
5. Sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah.
7. Sebagai upaya meningkatkan kualitas standar analisis biaya (SAB) bukan lagi hanya sekadar standar analisis belanja (SABe).
8. Sebagai suatu bantuan penerapan pendekatan anggaran kinerja (*performance budget*) dan *mid term expenditure framework* (MTEF) dalam penganggaran.

Kelemahan Akuntansi Basis Akrua

Kekurangan dari akuntansi berbasis akrual menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) No.1 tentang *Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities* (Second edition, 2003) yakni:

- a. Penerapan basis ini perlu mempersiapkan biaya yang cukup besar karena untuk menangani aset, penyiapan kebijakan akuntansi,
- b. Basis akrual kurang memberikan arti untuk sektor publik atau pemerintahan karena didesain untuk mengukur laba.

membangun sistem akuntansi untuk mendukung sistem tersebut dibutuhkan komputer atau peralatan lainnya serta sumber daya manusia yang siap untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

c. Basis akrual lebih kompleks memungkinkan parlemen (DPR/DPRD) kurang memberikan perhatian dalam menelaah laporan keuangan sehingga mengurangi akuntabilitas.

d. Diperlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (*professional judgement*) baik penyedia laporan keuangan maupun auditor pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual yang merupakan langkah awal dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (Simanjuntak, 2005). Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk segera menerapkan basis akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Maksud dari definisi tersebut penggunaan basis akrual untuk mengakui transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas. Sedangkan untuk mengakui transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Pada modul *general ledger & chart of accounts* yang disusun oleh Islam dkk. (2010) disebutkan bahwa implementasi

konsep akrual yang diterapkan saat ini masih gabungan kas dan akrual (*Cash Toward Accrual*) misalnya transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan basis kas tetapi penyusunan neraca dengan basis akrual. Widjajarso (2008)

memaparkan bahwa penerapan akrual basis terdapat dua model yakni:

1. Model sekaligus (*big bang*)

Model ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan jarang digunakan. Manfaat model ini mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan menghindari resiko kepentingan. Kelemahan juga dimiliki oleh model ini yakni beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan komitmen politik mungkin bisa berubah (Widjajarso, 2008).

2. Model Bertahap

Keuntungan model ini dapat diketahui permasalahan yang

Strategi Implementasi Basis Akrual

Dalam implementasi basis akrual di pemerintah pusat maupun daerah tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang matang dalam penerapannya. Oleh karena itu pemerintah perlu hati-hati, karena basis akrual relatif lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas yang relatif sederhana. Seperti yang telah dijelaskan oleh Widjajarso (2008) mengenai model

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2013) memaparkan bahwa penelitian kualitatif

mungkin timbul dan dicarikan cara penyelesaiannya selama masa transisi untuk mengurai resiko kegagalan. Namun untuk dapat menerapkan model ini dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak karena menerapkan dua basis secara bersamaan. Hal ini akan mempersulit perubahan budaya organisasi dan momentum penerapan basis akrual akan hilang (Widjajarso, 2008). Jika dibandingkan dengan model *big bang*, model ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang.

penerapan dalam akrual basis. Dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model *big bang*, pemerintah lebih cenderung menggunakan model bertahap. Menurut Widjajarso (2008) hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dan dicarikan penyelesaiannya selama masa transisi sehingga mengurangi resiko kegagalan.

merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang berupa kata-kata dan bahasa bukan statistik. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus

karena dirasa tepat jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan *how* atau *why*. Seperti yang dijelaskan oleh Yin (2011) pendekatan studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang mengontrol peristiwa yang diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena *kontemporer* (masa kini atau telah berlangsung tapi menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat, atau khusus saat penelitian dilaksanakan) di dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Sekaran (2007) studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. Tujuan peneliti menggunakan studi kasus untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam kepada objek yang akan diteliti dengan harapan memberikan hasil dan gambaran yang lengkap terhadap

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Bungin (2008:108) wawancara secara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di BPKAD Pemerintah Kota Mataram. Alasan dipilihnya lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni: (1) sumber data yang tersedia, (2) akses ke dalam lokasi yang akan diteliti, (3) BPKAD selaku SKPD entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan dan SKPKD selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan (konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah), dan (4) laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung baik lewat wawancara, observasi maupun dokumentasi pada objek yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan dengan penelitian seperti Peraturan Walikota (Perwal), APBD dan kebijakan akuntansi.

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi

Sugiyono dalam Patton dan Nasution (2007) menyatakan manfaat pengumpulan data dengan observasi sebagai berikut: (1) dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data

dalam keseluruhan situasi sosial; (2) dengan observasi akan memperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif; (3) dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu; (4) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif; (5) peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden sehingga mendapatkan gambaran yang lebih

HASIL PEMBAHASAN

Sejak tahun 2014 atau pada saat masa transisi dari *Cash Toward Accrual* (CTA) menuju *full accrual*, Pemerintah Kota Mataram sudah mencoba untuk menyajikan neraca terutama untuk akun piutang secara NRV (*net realizable value*). Selain itu, untuk penghapusan piutang khususnya piutang pajak daerah atau retribusi daerah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Walikota (Perwal) tersebut disebutkan bahwa piutang pajak yang kadaluarsa adalah piutang pajak yang sudah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sedangkan untuk retribusi yang kadaluarsa adalah retribusi yang sudah melewati tenggang waktu 3 (tiga) tahun. Persentase yang

komprehensif; (6) peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik permasalahan. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga peneliti bisa mengetahui hal yang pernah terjadi di waktu silam (Bungin, 2008).

digunakan untuk menyisihkan maupun menghapus piutang ini tidak sama dengan daerah lain karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan persentase sesuai dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 64 Tahun 2013 khususnya pada lampiran II dijelaskan bagaimana model penyusunan basis akrual dan panduan penyusunan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah). Panduan SAPD tersebut masih sama dengan CTA (*Cash Toward Accrual*) dimana transaksi-transaksi yang melibatkan SKPD dan SKPKD dihubungkan oleh akun; Aset Untuk Dikonsolidasikan – RK SKPD (akun untuk SKPKD dengan klasifikasi Aset Lancar) dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan – RK PPKD (akun untuk

SKPD dengan klasifikasi Ekuitas). Tetapi untuk klasifikasi RK PPKD pada akuntansi akrual terdapat perbedaan dengan klasifikasi pada basis CTA (*Cash Toward*

Accrual), dimana RK PPKD diklasifikasikan pada kewajiban jangka pendek.

Berikut ini akun-akun yang perlu disajikan kembali sebagai akibat dari diterapkannya akrual basis sebagai berikut:

- a) Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b) Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar dimuka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c) Aset tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

Berikut ini adalah bagaimana teknis untuk akuntansi PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) terhadap akun pendapatan transfer. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh

- d) Aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- e) Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- f) Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- g) Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Namun penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, karena kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan

transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus ini, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Transfer LO” di kredit dengan jurnal:

	Kas di Kas Daerah
	xxx
	Pendapatan Transfer
LO	xxx

Tetapi, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi. Jika pendapatan transfer yang diberikan kurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ada pada perjanjian sebelumnya maka PPKD mencatat “Piutang Pendapatan” di debit dan “Pendapatan Transfer LO” di kredit dengan jurnal:

	Piutang Pendapatan
	xxx
	Pendapatan Transfer
LO	xxx

Apabila Pemerintah Kota Mataram telah menerima dana dari pemerintah pusat atas kurang bayar tersebut, maka Rekening Kas Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini

maka PPKD akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Pendapatan Transfer” di kredit dengan jurnal:

	Kas di Kas Daerah
	xxx
	Piutang Pendapatan
Transfer	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan transfer, PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Transfer LRA” di kredit dengan jurnal:

	Estimasi Perubahan SAL
	xxx
	Pendapatan Transfer
LRA	xxx

Selain itu, untuk pembelian barang yang akan menjadi persediaan maka di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus diakui sebagai realisasi anggaran tetapi harus dilihat lagi berapa sisa persediaan tahun lalu yang digunakan untuk tahun ini dan persediaan barang yang dibeli tahun ini tetapi tersisa di akhir tahun sehingga tidak bisa diakui sebagai beban dan harus dikeluarkan. Jadi, di LRA diakui sebagai belanja tapi di Laporan Operasional (LO) tidak boleh diakui karena belum digunakan.

Oleh karena itu perlunya ketelitian yang lebih untuk basis akrual ini terutama bagi bendahara-bendahara di

Proses menuju Basis Akrual di BPKAD Kota Mataram

BPKAD selaku SKPD entitas akuntansi dan juga SKPKD sebagai entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan basis akrual. Sebagai wujud pemerintahan *good governance* dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hadirnya basis akrual ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati terlepas dari adanya rasa suka atau tidak. Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penggunaan basis akrual khususnya pada lampiran II yang mengatur tentang *Cash Toward Accrual* (CTA), BPKAD Kota Mataram sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan basis akrual ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubbid Bina Akuntansi dan Pelaporan, Yeyen Mardiyani, berikut:

“Jadi kan PP 71 Tahun 2010 memuat dua lampiran, jadi di lampiran II itu kan disebutkan bagi yang belum siap disuruh menggunakan CTA sedangkan di lampiran I itu harus dilaksanakan basis akrual setelah tahun 2015. Jadi sebelum tahun 2015 atau saat

SKPD yang secara teknis menginput data transaksi.

kita masih menggunakan CTA kita sudah melakukan persiapan-persiapan, seperti di tahun 2014 diadakan sosialisasi dari pusat yang dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan akan diterapkannya basis akrual.”

Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 BPKAD Kota Mataram sudah siap untuk menyambut basis akrual ini baik itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, bimtek (bimbingan teknis) agar pemahaman pegawai di BPKAD terkait basis akrual ini semakin kuat. Tidak hanya dari pusat saja yang melakukan sosialisasi maupun pelatihan tetapi dari BPKAD selaku *leading sector* dalam implementasi basis akrual ini juga melakukan sosialisasi dan pelatihan di daerah kepada SKPD di Kota Mataram. Berikut ini persiapan yang dilakukan BPKAD menuju basis akrual:

- 1) Bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan Universitas Mataram (Unram).
- 2) Membuat kebijakan akuntansi dan sisdur (sistem prosedur)

- 3) Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan

Faktor Pendukung Implementasi Basis Akrua di BPKAD Kota Mataram

1. Komitmen Pimpinan;
2. Sumber Daya Manusia

Kendala Dalam Implementasi Basis Akrua di BPKAD Kota Mataram

Seiring berjalannya waktu penerapan basis akrua, masalah-masalah yang muncul semakin terlihat jelas dan perlu ada upaya untuk mengatasi dan mencegah masalah tersebut. Tetapi tiap-tiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda-beda walaupun secara garis besar masalah yang muncul hampir sama di tiap daerah. Berikut ini adalah kendala-kendala selama pelaksanaan basis akrua yang terjadi di BPKAD Kota Mataram:

1. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Selain sebagai faktor pendukung penerapan basis akrua, ternyata SIMDA juga menjadi kendala dalam pelaksanaan basis akrua karena perubahan dari CTA ke akrua mengakibatkan *software* yang dipakai sebelumnya harus diperbaharui. Masalah yang timbul dikarenakan SIMDA yang diberikan oleh BPKP ini masih dalam tahap penyempurnaan sehingga

- 4) Melakukan studi banding

3. Teknologi Informasi
4. Penyiapan Regulasi
5. Kerja Sama dan Dukungan Semua Pihak

belum bisa mengakses seluruh sistem akrua.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) antara BPKAD dengan SKPD

Selaku *leading sector* dalam pelaksanaan basis akrua BPKAD sudah melakukan persiapan salah satunya dengan menyiapkan SDM. Sejauh ini SDM yang ada di BPKAD sudah kompeten dan tidak memiliki masalah yang berarti terkait basis akrua ini. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di SKPD-SKPD yang ada di Kota Mataram, adanya *disparitas* (perbedaan) kualitas antara SDM yang ada di SKPD dengan BPKAD seperti yang diungkapkan Yance Hendradirra berikut:

“Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu *disparitas* kualitas SDM BPKAD dengan SKPD yang lain. Di sini SDM nya kuat sedangkan di SKPD lain tidak kuat.”

Adanya *gap* atau perbandingan kualitas SDM antara BPKAD dengan SKPD menunjukkan bahwa dari sisi pendidikan masih kurang sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang lebih *intens*. Jika

memungkinkan, para pegawai di SKPD-SKPD tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar ilmu akuntansi semakin bertambah dan pemahaman mereka semakin menguat. Sehingga, ketika sudah

Kesimpulan dan Saran

Secara umum pelaksanaan basis akrual di Kota Mataram khususnya di BPKAD Kota Mataram berjalan sangat baik. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2014 mulai dilakukan penyisihan piutang tak tertagih dan penghapusan piutang selain itu sejak laporan keuangan tahun 2014 sudah disusun sudah menggunakan NRV (*net realizable value*). Dari sisi sistem dan regulasi sudah sangat mendukung yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Mataram yang didalamnya terdapat sistem dan prosedur akuntansi. Ini juga menunjukkan komitmen pimpinan yang tinggi sehingga dihasilkan Perwal (Peraturan Walikota) tersebut. Saran yang diberikan peneliti untuk BPKAD Kota Mataram dalam melaksanakan basis akrual:

1. BPKAD Kota Mataram selaku *leading sector* dalam pengelolaan keuangan dan juga *role model*

menyelesaikan pendidikan mereka dapat menyampaikan ilmu yang didapat kepada pegawai atau staff lainnya dan *transfer knowledge* ini harus berjalan dengan baik agar ilmu yang disampaikan dapat diserap dengan baik.

dalam pelaksanaan basis akrual perlu memperhatikan *transfer knowledge* antara SDM yang ada di BPKAD dengan SKPD sehingga *disparitas* yang muncul bisa dipangkas.

2. Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang basis akrual harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat basis akrual ini banyak mengalami perubahan baik dari sisi regulasi, kebijakan dan teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada permasalahan yang berarti dalam implementasi basis akrual di Kota Mataram.
3. Kualitas pegawai lebih ditingkatkan salah satunya dengan cara memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga SDM yang ada semakin menunjang dalam penerapan basis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus di Satuan Kerja KPPN Malang)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2009. *Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Nasional di Bidang Akuntansi Sektor Publik*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Juli. 2009.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Standar Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ichsan, M. tanpa tahun. "Basis Akrua Akuntansi Pemerintahan: Pondasi Bagi Penerapan Akuntansi Biaya". *Artikel online* <http://www.scoresociety.com/component/content/article/36-tulisan/66-basis-akrua-akuntansi-pemerintahan>, diakses pada 5 Februari 2016.
- Islam, S, dkk. 2010. "Future Model Sistem Akuntansi". *Modul general ledger chart of accounts*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UH Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sari, Dwi Ratna. 2010. "Kondisi Faktual Sistem Akuntansi Pemerintahan". Diedit oleh Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, dan I Wayan Karman, dalam *Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Binsar H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 1 No.1, Mei.
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia Jakarta 9 Desember 2010.
- Widjajarsa, Bambang. 2008. *Penerapan Basis Akrua pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. Disampaikan dalam "Seminar Akuntansi Berbasis Akrua" Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan. Jakarta,
18 Desember 2008.
([http://sutaryofe.staff-
uns.ac.id/files/2011//10/akunta
nsi-berbasisakrualpdf](http://sutaryofe.staff-uns.ac.id/files/2011//10/akuntansi-berbasisakrualpdf) diakses
pada tanggal 20 Februari
2016).

Yin K. Robert, Prof. 2011. *Studi Kasus:
Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.